

PEMOLISIAN MODEL EKOLOGI-ETNIS

Saputro Satriyo

Abstract

The perception of crime by the National Police is continually developing, for example 1950's and 1960's, it is responded with the increasing police patrol. And in 1970's is introduced analysis method of a characteristic of areas vulnerable to criminal acts. Both of these methods failed because it was implemented awkwardly such as there were the unity of data, processing and output. In addition, National police has lack of competencies in handling law enforcement in rioting such as: in Tasikmalaya, Situbondo, the killing a number of psychics. Currently, in the new society, this will be covered in this article, the method offered is "EC Ethno Policing" where the aim is to actuate the criminal controlling of criminal acts.

Pada pertengahan Mei 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi telah menandatangani *Memory of Understanding (MOU)* dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal itu juga menandakan bahwa Kapolri Jenderal (Pol) Drs. KPH. Rusdihardjo memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran lingkungan hidup.

Sejalan dengan makin intensifnya pemberlakuan otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menandakan bahwa kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom tentang bidang lingkungan dikatakan bahwa pengendalian tersebut berdasarkan

pengawasan represif yang berdasarkan supremasi hukum (penjelasan pasal 22 huruf g). Di sinilah polisi bertindak lebih menonjol sebagai lembaga pengawasan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan alam

Kompas pada tanggal 20 April 2000 mewartakan betapa bertambah rusaknya hutan Mangrove di Kalimantan. Hasil penelitian J. Mackinon dan MB Artha pada 1981 dalam bukunya *The Ecology of Kalimantan* menyebutkan bahwa hutan Mangrove Kalimantan Timur mencapai 950.000 hektar dari 1.580.000 hektar hutan Mangrove Kalimantan. Namun dalam 15 tahun kemudian, hutan Mangrove

itu berkurang sekitar 200.000 hektar. Ini akibat dari kegiatan konversi, terutama untuk pertambakan. Menurut Dr. Andri E. (IPB-2000) keutuhan ekosistem hutan Mangrove itu, termasuk habitat perairannya sangat tergantung dengan pasang surut air laut. Ketika kawasan itu dibuka menjadi areal pertambakan dengan cara tradisional, kini kawasan itu mengalami degradasi kualitas lingkungan yang sangat dahsyat. Kerusakan hutan Mangrove itu pun meluas di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan pulau lainnya. Padahal, hanya selang 2-3 tahun diperoleh kabar bahwa para petambak tidak lagi mendapatkan keuntungan darinya. Mereka malah mengalami kerugian besar akibat banyaknya udang yang mati karena tidak sanggup bertahan dalam kondisi lingkungan yang buruk.

Kompas pada tanggal 23 Mei 2000 juga memberitakan mengenai kerusakan hutan akibat kebakaran, pencurian, bahkan penjarahan oleh negeri jiran, yakni dengan menggeser patok batas RI-Malaysia. Aktifitas perambahan hutan dilakukan dengan memakai alat berat seperti bulldoser dan eskavator yang dilakukan 24 jam, non-stop. Puluhan hektar hutan sudah rusak dibabat dan juga ditemukan ratusan meter kubik kayu balok dalam berbagai ukuran yang siap diangkut ke Serawak. Menurut penuturan pemuka masyarakat, kegiatan perambahan hutan oleh warga Malaysia di Jagoi-babang Kalimantan Barat dilakukan semenjak tahun 1988. Sedang perambahan hutan oleh negeri jiran di Kalimantan Timur terjadi di Long Bawang, Kabupaten Bulungan. Kerugian negara akibat pencurian hutan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kayu yang dicuri per bulan: 80.000 - 100.000 m³
Harga kayu: 80 dolar AS/m³
Dana reboisasi yang tak dibayarkan: 80 dolar AS/ m³
Provisi sumber daya hutan yang tak dibayarkan: 20 dolar AS/m³
Total kerugian perbulan: 8 - 10 juta dolar AS

Ada pula aktifitas penambangan liar yang dapat diutarakan sebagai berikut:

- 30 ton emas/tahun
- 4 juta ton batu bara/tahun
- 2.800 karat intan/bulan

Menurut Mentamben Susilo Bambang Yudoyono, kegiatan penambangan tanpa ijin (PETI) ini merugikan Negara dalam jumlah yang cukup besar. Berbagai prasarana jalan dan lingkungan alam menjadi rusak karena penambangan meninggalkan bekas galian berupa kolam-kolam yang membahayakan. Prof. Dr. Sri Saeni, pakar kimia lingkungan IPB, menyatakan bahwa bekas-bekas penambangan emas tercemar racun air raksa (Hg) sangat berbahaya bagi kehidupan nabati-hewani maupun manusia. Bahkan telah terjadi desertifikasi (bekas galian menjadi padang pasir) di tengah hutan tropis di Kalimantan.

Kalau kita mengamati perkotaan, tingkat pencemaran udara di Jakarta menduduki peringkat ketiga setelah Bangkok dan kota-kota di Amerika Latin. Himbauan para relawan untuk memperingati Hari Bumi Sedunia agar tidak merokok dan tidak membuang gas emisi melalui transportasi di bulan April pun tidak mendapat sambutan yang cukup berarti oleh warga DKI. Kesadaran dan kemauan untuk

bersama-sama menjaga udara bersih, tanpa ada *enforcement* rupanya kurang berhasil.

Lingkungan perairan baik esturia maupun lautan berupa potensi di dalamnya pun sudah cukup memprihatinkan. Rusaknya terumbu karang, kegiatan "bom ikan" oleh nelayan tradisional, pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing, tampak seperti kegiatan legal. Padahal semua kegiatan itu ilegal. Eforia Reformasi bahkan menambah masyarakat menjadi semakin tunatertib dan suka berbuat tidak disiplin. Kejadian ini memberikan indikasi bahwa norma lama belum ditinggal sementara norma baru belum dianut, sehingga timbullah apa yang disebut "anomi." (Soeyoed Binawahyoe: 1988). Entropi masyarakat menjadi semakin tinggi pada masyarakat yang sedang tumbuh (Soerjo Adiwibowo: 2000).

Ilmu Kepolisian

Pada salah satu rapat dengar pendapat, Namase Malo, salah seorang anggota DPR menyarankan bahwa UU No. 28/1997 tentang Kepolisian RI perlu diamandemen. Hal ini agar para penegak hukum asal kepolisian bisa bertindak profesional, mandiri dan jauh dari sikap militeristik. Pada forum itu juga disampaikan pula bahwa para pendiri kepolisian diminta untuk tampil sebagai lembaga pengayom, penjaga, pelindung dan penegak yang konsisten di tengah-tengah masyarakat. Namun karena Panglima TNI masih ikut mengatur kewenangan Polri melalui pasal 7, 9, 11, maka perilaku Polri masih terkesan berjiwa otoriter.

Sejalan dengan gagasan Prof. Parsudi Suparlan (1999: 62), Ilmu Kepolisian didefinisikan sebagai sebuah

bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isu-isu penting serta pengelolaan keteraturan sosial, moral dan masyarakat; mempelajari upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan; mempelajari teknik-teknik penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya.

Perkembangan Ilmu Kepolisian tampak masih linear. Kadar pertanggungjawaban personal masih menggunakan beberapa parameter, yakni:

- a. Instrumental : Penetapan visi, misi, kebijakan masih belum berkesinambungan dan belum jelas yang mengakibatkan rencana aksi (action plan) pada tingkat Komando Operasional Dasar kurang proaktif dalam melayani masyarakat. Masyarakat masih sering melakukan tindakan main hakim sendiri yang menandakan bahwa citra-wibawa Polri masih mencapai titik terendah.
- b. Struktural: Organisasi bersifat komando, sehingga terasa kaku dan kurang efektif dalam menangani konflik-konflik etnis (lokal). Kurangnya profesionalitas akan tampak lebih jelas manakala perilaku organisasi tidak dibentuk tim *bulding* untuk menangani kasus-kasus yang cukup serius. Untuk menyiapkan sumber daya Polri yang handal adalah perlu membentuk organisasi pembelajaran yang dinamis dan kreatif sesuai perkembangan zaman.
- c. Kultural: Aspek struktural dan aspek instrumental yang bermuara pada aspek kultural karena kesemuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas pelayanan aktual Polri terhadap masyarakat (Rusmanhadi 1999: 25).

Persepsi linear yang tersebut di atas itu pada wawasan lingkungan hidup dan manajemen telah dianggap usang karena menurut Gunter Stent (1993: 23), telah ada pandangan secara siklis (Non-Mekanistik) untuk penanganan permasalahan secara holistik dan paradigma sistematis (Capra, Rifkik: 1995).

Lingkungan Hidup

Dalam pasal 1 bab 1 UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Gatot P. Soemartono 1996: 16). Secara umum lingkungan itu berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial.

Pertama, lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain.

Kedua, lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil.

Ketiga, lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman bahkan orang lain yang belum dikenal (Amsyari 1989: 11-12).

Namun lingkungan seperti di atas tadi selalu mengalami perubahan. Agar lingkungan tersebut dapat

mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan berbagai penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan itu. Perubahan yang terus terjadi seperti halnya pembedaan lingkungan (Erityana, 2000) adalah perubahan lingkungan, sosial budaya dan lingkungan bisnis.

Selama ini pendekatan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan bersifat mekanistik (Newtonian, Cartesian abad ke-17), akibatnya dampak pada kerusakan lingkungan bertambah parah.

Pandangan Cartesian ini ternyata menemui kegagalan atau kekeliruan dalam menangani berbagai permasalahan, seperti:

- Pengelolaan hutan;
- Pengelolaan pertanian;
- Pengelolaan perikanan;
- Kualitas udara;
- Kualitas air;
- Kependudukan;
- Erosi;
- Kehidupan (biota) liar;
- Pengelolaan pesisir dan laut;
- Hubungan antarmanusia.

Karenanya, diperlukan paradigma baru (non-Cartesian, non-Mekanistik) untuk mengembangkan teori, ilmu pengetahuan, praktek dan pola pikir untuk memecahkan masalah kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan yang meluas. Inilah saatnya pendekatan Sistemik dan Holistik berperan (Capra, 1982).

Model suksesi ekologi (Odum, 1971) adalah struktur dan energi komunitas, ekosistem taraf tumbuh dan ekosistem taraf dewasa. Analogi suksesi sosial dengan suksesi ekologi dapat dimatrikskan sebagai berikut:

Atribut Sistem Sosial	Taraf Tumbuh	Taraf Dewasa
Stabilitas Sistem	Stabilitas politik, ekonomi dan keamanan rendah/semu	Stabilitas politik, ekonomi dan keamanan tinggi
Entropi	entropi tinggi akibat KKN yang hebat	entropi rendah akibat penegakan hukum yang kuat
Umpan balik negatif (Negative feed back)	Kontrol sosial dari lembaga legislatif dan yudikatif rendah	Kontrol sosial dari lembaga legislatif dan yudikatif yang efektif

Eco Ethno Policing

Dalam seminar pada bulan April 2000 yang diadakan oleh Universitas Bhayangkara Jaya bekerja sama dengan Edit Cowan University di Jakarta, "Keamanan (Security)" telah didefinisikan sebagai berikut:

Security may be defined as a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its end without disruption or harm and without fear of disturbance or injury (Fischer and Green. 1992: 3). For organization this means being able to continue their business and meet their goals without disruption or fear of disruption. (Keamanan didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang stabil dan relatif dapat diramalkan di mana seseorang ataupun kelompok dapat menggapai keinginannya tanpa gangguan dan tanpa rasa cemas akan gangguan atau tindak kekerasan (Fischer dan Green 1992: 3). Bagi organisasi hal ini artinya bisa melanjutkan kegiatannya dan menggapai tujuannya tanpa diganggu kekha-

watiran).

Terdapat kemajuan kalau kita melihat pergeseran dasar pola pikir dalam persepsi kejahatan oleh Polri seperti diurai di bawah ini.

a. Dekade 50-an dan 60-an.

Kejahatan didefinisikan sebagai

Kejahatan = niat jahat plus kesempatan

Rencana aksi pada Komando Operasional Dasar (KOD) adalah memperbanyak patroli bersepeda, sepeda motor, berkuda, *speed boat*.

Kegiatan itu tidak dapat berkelanjutan (sustainable), antara lain disebabkan:

1. Biaya yang dikeluarkan cukup besar sementara dukungan anggaran kecil.
2. Tata kota di negara ini, pertumbuhannya tidak mempertimbangkan lingkungan, sehingga metode patroli tidak efektif.
3. Anggota Polri dan masyarakat setempat kurang menyenangkan (hobi) olah raga bersepeda, sehingga

bersepeda di kota bukan merupakan suatu kebanggaan, sekaligus mempercepat kerusakan dari sepeda itu sendiri karena pemeliharaannya kurang intens.

b. Tahun 1970-sekarang. Metode yang dikembangkan adalah metode analisis suatu karakteristik kerawanan daerah (Drs. Momo Kelana, 1990), meliputi:

- Faktor-faktor Korelatif Kriminogen (Ipoleksosbudaghan)
- Police Hazard
- Ancaman Faktual

Instrumen ini oleh Polri telah dijabarkan secara linear (harga mati) sampai-sampai terdapat penyeragaman dari aspek data, proses maupun *output*. Akibatnya apabila ada inspeksi dari atasan terjadilah manipulasi angka-angka di layar: Situasi Tugas Pokok, Administrasi dan Komando (SITUPAK), maksudnya hendak menunjukkan bahwa kejahatan total rendah dan jarak kejahatan (*crime clearance*) naik. Ini merupakan indikator keberhasilan seorang Kepala Kepolisian setempat.

Tampaknya kejadian itu tetap digunakan sampai sekarang, karena

metode baru belum sempat dilahirkan oleh para pemerhati Polri. Puncak kegagalan atau "ketidakberhasilan" itu ditandai dengan tidak terselesaikannya penegakan hukum kasus-kasus kerusuhan massa (Tasikmalaya, Situbondo) hingga pengungkapan pembunuhan "Dukun Santet" di Banyuwangi, Malang, Sukabumi.

Ada beberapa fungsi Kepolisian terpaksa "dikambinghitamkan" karena saat itu memang sedang terjadi "ketidakpedulian" terhadap perkembangan zaman.

c. Setelah krisis melanda di semua aspek kehidupan masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal, Polri berusaha keras untuk tampil mandiri, bebas dari intervensi atau lembaga lain dan kurikulum pendidikannya bebas dari muatan militer (*demiliterisasi*). Visi, misi dan kebijakan telah digariskan dalam "buku biru" (Rusmanhadi, 1999).

Kini dalam masyarakat abad baru, ditawarkan pendekatan baru tentang analisa keamanan atau katakanlah bergeser lebih maju ke pendekatan "Eco Ethno Policing" dengan indikator sebagai berikut:

Cara berpikir (New paradigm thinking)	Persepsi terhadap permasalahan	Usulan solusi yang dibuat	Referensi
1. Pendekatan (approach)	Newtonian-Cartesian world view linear thinking	Holistic, systemic paradigm	Capra, Rifkin, Parsudi Suparlan
2. Orientasi waktu	Yang lalu	Prediksi yang akan datang	Arthur Anderson Kunarto

3. Kegiatan Utama	Modeling	Menyusun dasar-dasar peraturan dari pengetahuan pendukung keputusan	Asep Saefudin
4. Orientasi hasil	Menyelesaikan masalah	Berorganisasi pada tujuan organisasi	Erityono
5 Penggunaan dalam organisasi	Management information system (MIS)	Decision support system (DSS)	Australian federal police

Karena tampak telah mengglobal, hampir sama dengan sistem yang digunakan oleh kepolisian mancanegara, perangkat yang disiapkan antara lain:

1. Dibentuknya organisasi pembelajaran (AFP, 1998).
2. Data base informasi kriminal yang kuat.

3. Data base pengetahuan Kepolisian yang lengkap.

Namun paradigma baru tetap tidak ada maknanya apabila tidak didasari oleh etika dan moral yang sehat sebagaimana "sifat dasar cinta" (Asep Saefudin 2000: 5). Sebab kegagalan operasional selama ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya implementasi dari "Kode Etik Polri."

Daftar Pustaka

- Andre, Enderawan, 1998, *Ekologi Umum*, Bogor: Fakultas Kehutanan, IPB-Bogor.
- Djamin, Awaloedin, 2000, *Sejarah Polri*, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Erityono, 2000, *Teori Sistem Dalam Masalah Lingkungan*, Bogor: Pusat Ilmu Pertanian, IPB-Bogor.
- Kunarto, 1999, *Intelijen Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Rusmanhadi, 1999, *Reformasi Menuju Polri yang Profesional*, Jakarta: Mabes Polri.
- Saeni, Sri, 1989, *Kimia Lingkungan*, Bogor: Fakultas Ilmu Hayat, Dirjen Dikti, IPB-Bogor.
- Satriyo, Saputro, 2000, *Pengaruh Uap Pb (Timbal) pada perkelahian warga Matraman*, Jakarta: Studi Kasus, Bogor: IPB-Bogor.

Saefuddin, Asep, 2000, *Filsafat Sains*, Bogor: IPB-Bogor.

Suparlan, Parsudi, 1999, "Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat" dalam *Jurnal Polisi 1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-PTIK).

Sinivasan, Nana, 2000, *The need for Security in Industry*, Perth: Edith Cowan University, Australia

Yayasan Bhrata Bhakti Polri, Yayasan Obor Indonesia
&
Keluarga Besar Jurnal Polisi Indonesia

Mengucapkan

Dirgahayu
Hari Bhayangkara ke-54

1 Juli 1946 - 1 Juli 2000

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberkati seluruh keluarga besar Polri
dalam menyongsong Era Kemandirian Polri
guna membaktikan diri sebagai penjaga
keamanan seluruh rakyat Indonesia